

Resolusi Konflik di Dunia Islam: Studi Kasus Al-Shabaab di Somalia

Giyandra Meisarani

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai resolusi konflik terhadap permasalahan di Somalia dengan jalan-jalan yang sesuai dengan dunia Islam. Konflik yang ada di Somalia terkait gerakan jihad al-Shabaab saat ini telah berkembang menjadi isu internasional. Somalia sendiri merupakan negara yang baru saja mempunyai sistem pemerintahan yang kuat dan diakui oleh masyarakat internasional. Namun, hal ini disambut buruk oleh kelompok Al-Shabaab yang melakukan banyak serangan untuk membuktikan keberadaan mereka. Serangan-serangan yang terjadi membuat masyarakat Somalia yang tidak tergabung dalam al-Shabaab mengalami keresahan. Berbagai bantuan yang datang kepada pemerintahan Somalia lantas membuat Al-Shabaab bersifat defensif kepada negara-negara asing, termasuk organisasi Intergovernmental Authority on Drought and Desertification (IGADD) dan Uni Afrika. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa bantuan-bantuan yang diberikan akan mempengaruhi Somalia yang ingin dijadikan sebagai negara Islam yang utuh tanpa sentuhan negara-negara barat. Adapun resolusi konflik di atas menyesuaikan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad yang mengedepankan perdamaian dan kesejahteraan sebagai negara Islam.

Kata-kata Kunci: *Resolusi konflik, Dunia, Islam, Al-Shabaab, Somalia*

This paper discusses conflict resolution on problems in Somalia by principles taught in the Islamic world. The conflict in Somalia regarding jihadist group al-Shabaab has become an international issue. Somalia itself is a country that has just a strong government system, and has just recognized by international community. This phenomenon then led to many attacks conducted by the Al-Shabaab. The attacks made Somali people who were not members of al-Shabaab felt insecure. With the assistance that came to the Somali government, al-Shabaab felt defensive towards foreign countries, as well as international organizations such as Intergovernmental Authority on Drought and Desertification (IGADD) and the African Union. This is due to the fact that they felt that the assistance provided would affect Somalia, as they wanted to make the country with a whole Islamic system without the interference of western countries. In the given conflict resolution above, it adjusts to what has been taught by the Prophet Muhammad who put forward peace and prosperity as an Islamic state.

Keywords: *Conflict resolution, Muslim, World, Al-Shabaab, Somalia*

Somalia merupakan salah satu negara di Afrika yang identik dengan konflik seperti perang saudara yang berkepanjangan (Jatmika 2016). Somalia juga kerap dianggap sebagai negara yang selalu terdapat kekerasan, perebutan sumber daya alam, sengketa perbatasan, kekacauan, dan kemiskinan. Somalia sempat tidak mempunyai pemerintahan yang diakui, tidak memiliki mata uang nasional, atau ciri-ciri lain yang berhubungan dengan sebuah negara berdaulat. Masyarakat Somalia lantas hidup dengan kekacauan. Hal ini terlihat bagaimana hak-hak publik terabaikan ketika pemerintahan tidak memiliki legitimasi yang tetap. Somalia bertahan hidup tanpa hukum, pengawasan dan pemerintahan yang sah. Tidak hanya itu, kekacauan juga ditunjukkan dengan ketergantungan mereka pada pasar gelap, tidak adanya kewajiban untuk membayar pajak, hingga melonjaknya angka kelaparan dan kemiskinan.

Kekacauan berlangsung cukup lama. Somalia bahkan tidak memiliki pemerintahan nasional yang efektif selama lebih dari 20 tahun, di mana sebagian besar negara telah menjadi zona perang (BBC 2017). Dalam konteks demikian, Somalia masih terlalu berbahaya dan terpecah untuk mengadakan pemilihan umum yang demokratis, yang terakhir kali dilakukan pada tahun 1969. Parlemen dan presidennya dipilih melalui sistem yang kompleks, dengan para tetua klan memainkan peran yang berpengaruh dalam proses tersebut (BBC 2017). Ketika panglima perang oposisi merobek negara itu menjadi wilayah kekuasaan berbasis klan, pemerintah persatuan yang didukung secara internasional dan dibentuk pada tahun 2000 berjuang untuk membangun kontrol. Sementara itu, dua wilayah yang relatif damai, Somalia Utara dan Puntland, secara efektif memisahkan diri. Perebutan ibukota Mogadishu dan sebagian besar wilayah selatan negara itu oleh koalisi pengadilan syariah Islam pada tahun 2006 mendorong intervensi oleh pasukan Ethiopia, dan kemudian, pasukan Uni Afrika. Sejak 2012, ketika pemerintah baru yang didukung internasional menjabat, Somalia telah bergerak menuju stabilitas, tetapi otoritas baru masih menghadapi tantangan dari pemberontak Al-Shabaab yang bersekutu dengan Al-Qaeda (BBC 2018).

Al-Shabaab, atau “Pemuda,” adalah kelompok pemberontak Islam yang berbasis di Somalia. Kelompok militan Islam ini dibentuk oleh al-Ittihad al-Islami (AIAI) yang bermakna Persatuan Islam untuk membentuk “*Greater Somalia*” dengan aturan-aturan fundamental Islam (Felter *et al.* 2019). Tujuan utama al-Shabaab yaitu untuk mendirikan negara Islam di Somalia. Al-Shabaab, yang bersekutu dengan al-Qaeda pada tahun 2012, telah diusir

dari sebagian besar kota-kota utama yang pernah dikuasai, tetapi tetap menjadi ancaman kuat bagi negaranya sendiri (BBC 2018). Gagasan pemersatu al-Shabaab adalah oposisi terhadap pemerintah yang didukung Barat. Al-Shabaab muncul ketika Ethiopia, negara mayoritas Kristen, menyerbu Somalia pada Desember 2006 dan menggulingkan *Islamic Courts Union* (ICU) dari Mogadishu dengan sedikit perlawanan. Intervensi, yang datang atas permintaan Pemerintah Transisi Somalia, meradikalisasi al-Shabaab. Setelah banyak ICU melarikan diri ke negara-negara tetangga, al-Shabaab mundur ke selatan, di mana ia mulai mengorganisir serangan gerilya, termasuk pemboman dan pembunuhan, pada pasukan Ethiopia. Pada akhirnya al-Shabaab mendapatkan kontrol atas wilayah besar di Somalia tengah dan selatan (BBC 2018).

Daerah-daerah yang dikontrol al-Shabaab memberlakukan interpretasi kerasnya sendiri terhadap syariah, melarang berbagai jenis hiburan, seperti film dan musik; penjualan khat, tanaman narkotika yang sering dikunyah; merokok; dan pencukuran jenggot. Batu dan amputasi telah diberikan kepada tersangka pezina dan pencuri. Kelompok itu melarang kerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, menghalangi pengiriman bantuan karena kelaparan menjulang pada tahun 2017. Menurut PBB, hal tersebut yang memaksa sekitar delapan ratus ribu orang untuk meninggalkan rumah mereka (Felter *et al.* 2019). Al-Shabaab sempat mendapat dukungan dengan menjanjikan keamanan rakyat, tetapi kredibilitasnya menurun ketika menolak bantuan makanan dari barat untuk memerangi kekeringan dan kelaparan pada tahun 2011 (BBC 2018).

Dewan Keamanan PBB memberi wewenang kepada Uni Afrika untuk memimpin pasukan penjaga perdamaian African Union Mission to Africa (AMISOM) di Somalia pada awal 2007. Mandat utamanya adalah melindungi pemerintah transisi negara itu, yang baru diterapkan pada 2004 tetapi baru saja kembali berkuasa di Mogadishu. Uganda adalah negara pertama yang mengirim pasukan ke Somalia di bawah AMISOM, dan mempertahankan kontingen terbesar di pasukan regional, lebih dari enam ribu pasukan. Kekuatan militer lainnya datang dari Burundi, Ethiopia, Kenya, dan Djibouti. Secara total, AMISOM terdiri dari sekitar dua puluh ribu pasukan. Pada akhir 2017, AMISOM menarik seribu pasukan sebagai langkah pertama dalam penarikan bertahap. Dewan Keamanan PBB kemudian menunda pengurangan jumlah pasukan lebih lanjut hingga 2019. Dengan Mogadishu dan kota-kota lain sekarang di bawah kendali pemerintah, ada perasaan optimisme dan banyak warga Somalia telah kembali dari pengasingan, membawa uang

dan keterampilan mereka bersama mereka. Layanan dasar seperti penerangan jalan, *dry cleaning*, dan pengumpulan sampah telah dimulai kembali di ibukota (BBC 2018).

Resolusi Konflik al-Shabaab di Somalia

Somalia selama ini hampir tidak pernah tersentuh oleh radikalisme Islam asing. Sementara upaya domestik al-Itihaad al-Islaami (AIAI) untuk membangun ideologi Islam radikal di Somalia memiliki beberapa efek (terutama pengembangan yang mengarah pada pembentukan al-Shabaab), pejuang asing, terutama yang terhubung dengan Al-Qaeda, tidak dapat memanfaatkan lingkungan Somalia secara anarkis meskipun berhasil dalam merencanakan pemboman 1998 di kedutaan besar AS di Tanzania dan Kenya, yang dipimpin dari wilayah Somalia (Dobos 2016). Lingkungan yang bebas dari campur tangan negara juga merupakan lingkungan yang mudah diakses oleh agen-agen asing karena mereka tidak harus berurusan dengan masalah kedaulatan negara. Kurangnya sentuhan pemerintah pusat juga dapat dikatakan dengan kurangnya lembaga untuk naik banding di panggung internasional dan kurangnya sekutu kuat yang mungkin melindungi wilayah negara. Jika setidaknya ada negara lemah, ia dapat mencoba untuk melindungi kedaulatannya dengan banding internasional dan dengan demikian meningkatkan biaya serangan di wilayahnya.

Pada 21 September 2013 sekelompok pria bersenjata Islam menyerbu Westgate Mall di Nairobi dan menembaki pembeli akhir pekan, menewaskan lebih dari 80 orang. Orang-orang bersenjata itu dilaporkan berteriak dalam bahasa Swahili bahwa orang-orang Muslim akan diizinkan pergi sementara yang lain menjadi sasaran pertumpahan darah mereka. Negara-negara seperti Prancis, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Ghana, antara lain, semuanya menegaskan bahwa warga negara mereka termasuk yang terdampak. Penyair Ghana yang terkenal, Kofi Awoonor, juga dikonfirmasi tewas dalam serangan itu. Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas serangan mengerikan melalui akun Twitter-nya. Dalam *tweet* lain mereka menyatakan penolakan mereka untuk bernegosiasi dan kemudian mengatakan, "Sudah lama kami berperang melawan Kenya di tanah kami, sekarang saatnya untuk menggeser medan perang dan membawa perang ke tanah mereka". Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh al-Shabaab adalah serangan balasan atas operasi militer Kenya

terhadap kelompok Islam di Somalia. Kenya memiliki sekitar 4.000 tentara di Somalia selatan. Mereka melakukan intervensi pada 2011 setelah serangan dan penculikan di Kenya utara dekat perbatasan Somalia. Kenya kemudian dimasukkan ke dalam pasukan Uni Afrika yang lebih besar dari 17.000 pasukan penjaga perdamaian dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pemerintah Somalia yang lemah. Mandat ini menempatkan pasukan Uni Afrika dan Islamis al-Shabaab di belati ditarik.

Invasi Ethiopia dari Somalia pada Desember 2006 menandai daerah aliran sungai dalam pengembangan dan radikalisasi al-Shabaab. Pertama, ini memberikan al-Shabaab kesempatan untuk menarik permusuhan Somalia yang mendalam terhadap Ethiopia untuk merekrut ribuan relawan nasionalis. Kedua, invasi memaksa al-Shabaab untuk mengadopsi strategi operasional gaya gerilya yang efektif sebagai cara untuk melawan kemajuan Ethiopia ke Selatan. Ketiga, “dengan memaksa para pemimpin ICU yang telah memberikan pengaruh moderat pada al-Shabaab untuk melarikan diri dari Somalia, invasi memungkinkan kelompok itu untuk menjadi lebih radikal, sementara pada saat yang sama memutuskan hubungannya dengan organisasi Somalia lainnya”. Meskipun invasi Ethiopia berhasil mengarahkan ICU dan mendorong al-Shabaab ke selatan negara itu, ia gagal mengakhiri radikalisme Islam di Somalia; pada kenyataannya, itu adalah faktor utama dalam pergantian ultra-radikal al-Shabaab, “mengubah kelompok dari bagian kecil, yang relatif tidak penting dari gerakan Islam yang lebih moderat menjadi faksi bersenjata paling kuat dan radikal di negara ini”. Pada tahun 2009 Ethiopia menarik pasukannya dari Somalia, digantikan oleh Misi Uni Afrika ke Somalia (AMISOM) yang terdiri dari ribuan pasukan penjaga perdamaian Uganda dan Burundi.

Sejak 2008, al-Shabaab telah menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan operasional untuk meluncurkan serangan mematikan terhadap pos-pos Barat dan musuh yang dirasakan di luar Somalia. Pada Oktober 2008, al-Shabaab mengoordinasikan lima serangan bom bunuh diri yang menghantam kompleks Program Pembangunan PBB, konsulat Ethiopia dan berbagai kantor pemerintah, menewaskan beberapa lusin. Pada bulan September 2009, Al-Shabaab mengebom misi penjaga perdamaian Uni Afrika di Mogadishu, menewaskan lebih dari 20 orang dan merusak kantor-kantor perusahaan AS yang konon memberikan dukungan kepada penjaga perdamaian. Pada 11 Juli 2010, al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri dua kelompok penggemar yang menyaksikan Piala Dunia di ibukota Uganda, Kampala, yang menewaskan lebih dari 70

orang, termasuk seorang warga negara Amerika. Serangan-serangan Uganda, menurut al-Shabaab, diluncurkan untuk menghukum negara itu atas perannya dalam membantu pasukan AMISOM di Somalia, dengan cara yang sama ketika serangan Westgate baru-baru ini diluncurkan untuk menghukum Kenya atas operasi militernya di Somalia sejak Agustus 2011 (Agbiboa 2014).

Setelah *Islamic Courts Union* (ICU) yang sudah tidak berfungsi pada tahun 2009, al-Shabaab berkembang sebagai pemerintahan yang menggantikan ICU dengan menyediakan keamanan yang dapat diandalkan di wilayah daerah kekuasaannya (Ingiriis, 2018). Administrasi al-Shabaab disusun sebagai sistem negara yang mampu memberikan keamanan utama di banyak bagian Somalia selatan. Dalam pemerintahannya al-Shabaab memperlihatkan keefisienannya dalam mengatur struktur pemerintahan, sistem perpajakan, peradilan dan keadilan, komando dan kerja sama di antara para pejuangnya daripada struktur pemerintah federal. Al-Shabaab menyediakan struktur pemerintahan yang lebih baik daripada pemerintah bukanlah klaim bahwa gerakan pemberontakan memiliki hak untuk memerintah, bahkan di mata rakyat Somalia yang hidup di bawah wilayahnya (Ingiriis, 2018). Untuk mencapai tujuan politis-religius membentuk negara Islam, al-Shabaab berusaha antara lokal dan eksternal, domestik dan luar. Secara internal, para pejuang al-Shabaab sekarang berada dalam konflik simetris yang serius mengenai di mana harus menempatkan kesetiaan mereka: Al-Qaeda atau negara Islam. Sebelum munculnya Negara Islam di Suriah, al-Shabaab dianggap sebagai satu-satunya kelompok militan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda yang memegang kendali teritorial yang signifikan di luar Asia. Seorang pembelot al-Shabaab menduga bahwa kemungkinan al-Shabaab akan mendelegasikan kekuasaan ke negara Islam. Terlepas dari kekhawatiran ini, badan intelijen pemerintah federal bersikeras bahwa negara Islam tidak memiliki hubungan dengan al-Shabaab. Namun, kekalahan negara Islam di Suriah, Irak dan di tempat lain tampaknya lebih mungkin daripada kekalahan al-Shabaab, mengingat bagaimana al-Shabaab telah mengakar dengan komunitas lokal (Ingiriis 2018).

Impian '*Greater Somalia*' juga untuk menanamkan barisan berbagai formasi Islam di negara itu, tetapi setiap proyek nasionalis yang berfokus pada apa yang bertentangan dengan apa yang diperjuangkannya, pasti akan gagal jika dirusak. Perkembangan seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara Islam dan nasionalisme (Solomon 2015). Nasionalisme Somalia juga dibantu oleh fakta bahwa hampir semua warga Somalia adalah

Muslim dan ini merupakan kekuatan pemersatu dalam menentang perpecahan yang dilakukan oleh klan. Di atas segalanya, Islam menambah kedalaman dan keterpaduan elemen-elemen umum dari budaya tradisional yang, di atas dan di atas banyak perpecahan bagian mereka, menyatukan orang-orang Somalia dan memberikan dasar bagi kesadaran nasional mereka yang kuat. Meskipun Somalia secara tradisional tidak membentuk negara kesatuan, warisan budaya nasionalisme, yang diperkuat oleh Islam, berada di belakang nasionalisme Somalia saat ini. Pada saat yang sama, diperlukan peringatan mengenai batas-batas Islam sebagai kekuatan penggerak dalam Masyarakat Somalia. Seperti yang dikatakan Ken Menhaus, 'Secara historis, Islam tidak pernah berhasil sebagai titik temu politik yang berkelanjutan dalam masyarakat Somalia; ia tidak pernah mampu mengatasi kekuatan pengorganisasian *clannisme* yang lebih kuat. Dalam lingkungan bermuatan politik saat ini, berbagai jenis aktivisme Islamis (pengadilan Syariah, Al Shabaab) cenderung diorganisir oleh klan dan bekerja dalam parameter *klannis*' (Solomon 2015). Dengan demikian, nasionalisme Islam yang bekerja melalui struktur klan mungkin berhasil, tetapi nasionalisme Islam yang diadu melawan klan akan, mengingat sejarah Somalia, gagal.

Ada indikasi bahwa al-Shabaab berusaha untuk menggabungkan nasionalisme dengan Islam radikal dalam mewujudkan impian '*Greater Somalia*'. Ini terlihat dalam nama tingkat al-Shabaab di pasukan Ethiopia atau AMISOM, menyebut mereka sebagai 'tentara salib' dan 'orang kafir'. Al-Shabaab juga menyebut intervensi AMISOM di Somalia sebagai '*Zio-Crusade*'. Jelas itu adalah upaya untuk menggambarkan Muslim Somalia di bawah ancaman dari Yahudi dan Kristen. Pemerintah Somalia, sementara itu, disebut sebagai *kooxda ridada* (kelompok murtad) dan nama yang diberikan al-Shabaab kepada pemerintah Mogadishu adalah *daba dhilif* (artinya pemerintah yang dibentuk untuk tujuan asing). Dengan kata lain, pemerintah itu sebenarnya bukan orang Somalia tetapi sebenarnya 'pemerintahan boneka' yang mewakili kepentingan asing (Solomon 2015). Mengingat orientasi Islamnya, al-Shabaab juga dapat dimotivasi oleh contoh Nabi Muhammad SAW yang selama masa hidupnya mengubah suku-suku nomaden yang tersebar dan beberapa pusat kota menjadi negara yang kuat. Sifat asing Islam al-Shabaab juga tampak jelas dengan cara lain. Secara tradisional dalam masyarakat Somalia, perempuan diperkenalkan dan klan hukum adat (*xeer*) sering menggantikan hukum syariah Islam dalam mengatur hubungan antara Somalia dan klan. Orang Somalia sering menggabungkan kepercayaan tradisional mereka - *roobdoon*

(hujan), *saar* (pemujaan roh) dan sihir - dengan keyakinan Islam mereka. Somalia selalu mendekati praktik Islam secara praktis, berbeda dengan dogmatis, sering lebih suka teosofi Sufi daripada hukum syariah Islamis. Seperti yang dikatakan Bronwyn Bruton dengan sangat indah, "Identitas Somalia sangat Muslim, tetapi identitas Muslim itu juga khas Somalia" (Solomon 2015).

Resolusi konflik memiliki artian penting dimana sebuah strategi untuk menyelesaikan sebuah konflik permasalahan yang terjadi. Dalam dunia Islam pertengkaran dipandang dapat menjadikan konflik aqidah atau ideologis (Ahmadi & Surwandono 2011). Dalam dunia politik yang merupakan salah satu bagian dari proses muamalah konflik pun juga seharusnya dapat diselesaikan juga melalui proses muamalah. Resolusi konflik dalam perspektif Islam juga dapat diartikan sebagai salah satu proses bagi kesejahteraan rakyat. Islam mengajarkan umat manusia untuk selalu menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian dan keselamatan umatnya mengingat kemunculan islam dengan konflik yang ada. Dalam al-Qur'an terdapat surat al-Hujurat yang memberikan artian bagaimana menghadapi konflik sendiri dalam Islam. Dalam konflik di dunia Islam Nabi Muhammad SAW selalu melakukan 'mempersaudarakan' kembali sehingga dalam konfliknya dapat diselesaikan dengan membentuk masyarakat yang kompetitif dan demokratis. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 mengatakan:

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."
(Q.S. 49:10)

Yang mana arti dari ayat tersebut mengatakan bahwa seluruh masyarakat muslim itu adalah saudara dalam agama Islam, maka apabila mereka bertengkar maka mereka harus di damaikan. Dalam konflik al-Shabaab di Somalia ini dengan al-Shabaab dan pemerintah Somalia sendiri yang sesama muslim sangat baik apabila kedua permasalahannya diselesaikan dengan perdamaian. Apabila konflik ini terus berlanjut akan menjadi rumit dan akan terus berlarut-larut seiring waktu. Semakin lama konflik ini berlarut semakin banyak aktor-aktor yang berusaha untuk membantu salah satu pihak untuk memenangkan konflik ini. Dimana al-Shabaab menuntut pemerintahan Somalia untuk tidak menerima bantuan dari barat dan bagaimana al-Shabaab sangat menjadi agresif ketika negara dengan agama lain campur tangan dengan negaranya.

Dalam melakukan resolusi konflik perlu diketahui bahwa terdapat tahapan apabila ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Hal yang perlu dilakukan yakni dengan memberikan kesepahaman antara kedua belah pihak yang berkonflik tentang apa yang mereka permasalahkan. Melihat dari kedua sisi adalah hal yang penting ketika ingin melakukan sebuah pemecahan masalah dalam berkonflik. Dalam kasus al-Shabaab di Somalia ini, pihak pemerintah dan al-Shabaab harus diberikan kepercayaan untuk memberikan masing-masing perspektif dalam melihat permasalahan konflik ini. Lalu langkah berikutnya adalah dengan memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk bernegosiasi mengenai konflik yang dihadapi. Hal tersebut dapat ditempuh dengan bantuan pihak ketiga, yakni melalui bantuan negara atau organisasi internasional yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berkonflik. Karena dalam resolusi konflik dengan cara Islam adalah dengan melakukan negosiasi yang membantu keduanya untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Dalam pelaksanaan bantuan di Somalia sudah banyak organisasi yang turut membantu permasalahan yang ada di Somalia. Seperti *Intergovernmental Authority on Drought and Desertification* (IGADD), yang didirikan pada tahun 1986 untuk mengkoordinasikan upaya negara-negara yang berposisi di tanduk Afrika untuk menghilangkan terjadinya kekeringan kronis dan kelaparan dari wilayah tersebut karena Negara tersebut tidak dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah itu sendirian. Sebelum IGADD mengambil peran utama dalam proses perdamaian Somalia, PBB dan negara Amerika Serikat adalah aktor utama yang berusaha untuk mendirikan pemerintah pusat dengan memfasilitasi negosiasi. Setelah keberangkatan Operasi PBB ke Somalia (UNOSOM) dan pasukan Amerika Serikat dari Somalia pada tahun 1995, IGADD menjadi aktif dalam memulai dan mensponsori proses perdamaian Somalia untuk mengisi kesenjangan (Demeké 2014). Sejak itu ia menganggap masalah Somalia sebagai agenda prioritas utama dan memediasi sejumlah proses perdamaian yang bertujuan untuk mendirikan pemerintah pusat di Somalia.

Terdapat juga upaya dari Uni Afrika yang membantu Somalia. Terlihat ketika pasukan Ethiopia dievakuasi dari Somalia setelah perjanjian damai Djibouti, ada celah keamanan besar yang akan membantu al-Shabaab untuk bangkit kembali dan untuk mengontrol wilayah yang hilang di Somalia Tengah dan Selatan termasuk Mogadishu. Dengan evakuasi Ethiopia, Uni Afrika memutuskan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian bernama AMISOM untuk memberikan

perlindungan keamanan kepada Pemerintah Federal Transisi II, atau TFGII, dan untuk menggulingkan legitimasi al-Shabaab. Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, dalam pertemuannya yang ke-69 pada 19 Januari 2007, mengamankan AMISOM untuk mendukung dialog dan rekonsiliasi di Somalia, untuk memberikan perlindungan kepada Lembaga-Lembaga Federal Transisi (TFI) dan infrastruktur utama mereka, untuk memungkinkan mereka melaksanakan tugas mereka, berfungsi, dan memberikan dukungan teknis dan lainnya untuk upaya pelucutan dan stabilisasi.

Resolusi UNSC 1725 pada Desember 2006 juga mengesahkan penyebaran Misi Penjaga Perdamaian Uni Afrika ke Somalia (AMISOM) (Demeke 2014). Selain itu, negara-negara IGAD sepakat untuk memodifikasi mandat organisasi untuk memungkinkan pembentukan Brigade Siaga Afrika Timur (EASBRIG). Hal ini diamanatkan untuk campur tangan dalam urusan internal negara-negara anggota dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masif, genosida dan perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional. Ini adalah langkah maju dalam pembangunan perdamaian di Somalia. Bekerja sama dengan komunitas internasional, AMISOM telah melatih dan membimbing inti dari Tentara Nasional Somalia yang direvitalisasi. Namun, pasukan Somalia menghadapi rintangan yang signifikan dalam hal peralatan, persenjataan, infrastruktur komunikasi, dan sumber daya. Di atas semua itu, AMISOM juga memprioritaskan pelatihan dan pendampingan Angkatan Kepolisian Somalia (SPF) melalui Komponen Polisi AMISOM untuk meningkatkan kapasitas keamanan pemerintah. Seperti yang diamati oleh beberapa pengamat di wilayah tersebut, jika bukan dukungan AMISOM, TFGII tidak akan bertahan sebagai pemerintahan di Mogadishu (Demeke 2014).

Kesimpulan

Al-Shabaab sebagai kelompok militan yang menginginkan yang terbaik bagi Somalia membuat Somalia berada dalam ambang batas yang merugikan bagi masyarakatnya sendiri. Somalia telah berjuang bertahun-tahun untuk mengembalikan kejayaannya yang pernah padam. Rencana al-Shabaab, apa pun itu, kemungkinan besar mendorong kedutaan besar barat khawatir untuk memperpanjang peringatan mereka tentang potensi serangan teror baru. Kegagalan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan hak-hak dasar untuk masyarakat seperti listrik, air, makanan, pendidikan, fasilitas kesehatan, menjadikan masyarakat terbiasa untuk mencari peng-

hidupan dari sektor informal dan berhubungan dengan kejahatan. Pemerintah Somalia dengan dukungan negara barat memandang al-Shabaab sebagai ancaman bagi warga negaranya dan memutuskan untuk memerangi al-Shabaab dan membangun pemerintahan Somalia yang menyejahterakan rakyatnya.

Secara umum, respons resolusi konflik IGAD dan Uni Afrika telah membawa perbaikan politik, sosial ekonomi dan keamanan yang luar biasa di Somalia terutama setelah pembentukan pemerintah pusat melalui proses demokrasi. Mereka juga mencapai perdamaian relatif di Somalia terlepas dari semua tantangan yang disebutkan di atas dalam implementasi dan konsolidasi perjanjian perdamaian. Pada umumnya, IGAD dan Uni Afrika memainkan peran besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Tanduk secara umum dan di Somalia khususnya. Respons resolusi konflik mereka harus diambil sebagai pencapaian terpuji dalam membangun perdamaian di Afrika.

Daftar Pustaka

Artikel Online

- BBC, 2018. "Somalia Country Profile" [daring]. Tersedia dalam <https://www.bbc.com/news/world-africa-14094503> [diakses pada 15 Juni 2019].
- BBC, 2017. "Who are Somalia's al-Shabaab" [daring]. Tersedia dalam <https://www.bbc.com/news/world-africa-15336689> [diakses pada 15 Juni 2019].
- Felter, C., Masters, J., & Sergei, M. A, 2019. "Al-Shabab", *Council on Foreign Relations* [daring]. Tersedia dalam <https://www.cfr.org/backgrounder/al-shabab> [diakses pada 15 Juni 2019].

Buku

- Al-Quran Terjemahan, 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
- Ahmadi, S. dan Surwandono, 2011. *Resolusi Konflik di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hansen, S. J, 2013. *Al-Shabab in Somalia: The History and Ideology of a Militant Islamist Group 2005-2012*. New York: Oxford University Press.
- Jatmika, S., 2016. *Hubungan Internasional di Kawasan Afrika*. Indonesia: Samudra Biru.
- Solomon, H., 2015. *Terrorism and Counter-Terrorism in Africa*. United Kingdom: Palgrave Macmillan.

Artikel Jurnal

- Agbiboa, D. , 2014. "Terrorism without Borders: Somalia's Al-Shabaab and the global jihad", *Journal of Terrorism Research*, 5(1): 27-31.
- Demeke, M. A., 2014. "Conflict Resolution Responses of IGAD and AU to the Somalia Crises", *International Journal of Political Science and Development*, 2(10): 248-257.

- Dobos, B., 2016. "Shapeshifter of Somalia: Evolution of the Political Territoriality of Al-Shabaab", *Small Wars & Insurgencies*, 27(5): 942.
- Ingiriis, M. H., 2018. "Building peace from the margins in Somalia: The case for political settlement with Al-Shabaab", *Contemporary Security Policy*, 39(2): 4-10.

